

## KOMPLEKSITAS KONFLIK PAPUA: MEMAHAMI INTERAKSI POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYA DALAM DINAMIKA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Sabrina Tamala<sup>1</sup>, Wulan Purnama<sup>2</sup>, Muhamad Bintang Raafi Nurfauzi<sup>3</sup>, Dewi Asri Puannandini<sup>4</sup>

[tamalasabrina@gmail.com](mailto:tamalasabrina@gmail.com)<sup>1</sup>, [purnamawulan249@gmail.com](mailto:purnamawulan249@gmail.com)<sup>2</sup>, [bintangraafi13@gmail.com](mailto:bintangraafi13@gmail.com)<sup>3</sup>, [dephee.brangka@gmail.com](mailto:dephee.brangka@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Nusantara

**Abstrak:** Konflik Papua adalah salah satu permasalahan Indonesia yang paling kompleks dan berkelanjutan. Tujuan dari laporan singkat ini adalah untuk melihat lebih dekat keterkaitan antara faktor politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk dinamika kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut. Analisisnya dimulai dari latar belakang sejarah Papua, termasuk integrasinya ke Indonesia dan dampak berbagai kebijakan pemerintah pusat. Faktor politik mencakup ketidakpuasan terhadap keterwakilan dan otonomi, sedangkan faktor ekonomi mencakup ketimpangan distribusi kekayaan akibat melimpahnya sumber daya alam. Kebudayaan juga memegang peranan penting, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai tradisional masyarakat Papua dengan kebijakan modernisasi yang diterapkan pemerintah. Sebagai wujud ketegangan tersebut, dikaji dinamika KKB, di mana kelompok bersenjata tidak hanya menuntut kemerdekaan politik tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memahami kompleksitas konflik, dengan harapan dapat memberikan perspektif baru dalam upaya penyelesaian konflik secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Konflik Papua telah menjadi salah satu permasalahan Indonesia yang paling kompleks dan sulit sejak wilayah tersebut bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969 karena opini publik (Pepera). Selama beberapa dekade, Papua telah mengalami berbagai dinamika konflik yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya yang saling mempengaruhi. Kehadiran kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menegaskan ketegangan dan frustrasi yang melanda wilayah tersebut. Secara politis, banyak masyarakat Papua yang merasa belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur politik Indonesia. Tuntutan otonomi khusus bahkan kemerdekaan merupakan wujud ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan tidak representatif. Dinamika politik ini seringkali diperburuk oleh tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan, sehingga menciptakan lingkaran kekerasan yang kejam.

**Kata Kunci:** Konflik Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata, Politik, Ekonomi, Budaya, Indonesia, Otonomi, Keadilan Sosial.

**Abstract:** The conflict in Papua is one of the most complex and enduring issues in Indonesia. This abstract aims to delve into the intricate interplay of political, economic, and cultural factors that shape the dynamics of armed criminal groups (KKB) in the region. The analysis begins with the historical background of Papua, including its integration into Indonesia and the impact of various central government policies. Political factors encompass grievances over representation and autonomy rights, while economic aspects involve the inequitable distribution of wealth from abundant natural resources. Culture also plays a significant role, with significant differences between the traditional values of Papuan society and the modernization policies implemented by the government. The dynamics of KKB are explored as a manifestation of these tensions, where armed groups are not only demanding political independence but also fighting for social and economic justice. This study employs a multidisciplinary approach to understand the conflict's complexities, with the hope of providing new perspectives for more comprehensive and sustainable resolution efforts. The conflict in Papua has been one of the most complex and challenging issues in Indonesia since the region joined the Republic of Indonesia through the Act of Free Choice (Pepera) in 1969. For several decades, Papua has experienced various dynamics of conflict influenced by the interaction between political, economic, and cultural factors. The presence

*of armed criminal groups (KKB) in Papua is a tangible manifestation of the tension and dissatisfaction that afflict this region. Politically, many Papuans feel that they have not been fully integrated into Indonesia's political structure. Demands for special autonomy and even independence have become forms of expressing dissatisfaction with central government policies perceived as unjust and unrepresentative. This political dynamic is often exacerbated by repressive actions by security forces, which trigger a cycle of violence.*

**Keywords:** Papua Conflict, Armed Criminal Groups, Politics, Economy, Culture, Indonesia, Autonomy, Social Justice.

## **PENDAHULUAN**

Perang Papua adalah konflik militer yang terus berlanjut di wilayah Papua Indonesia sejak tahun 1961. Konflik tersebut bermula dari keinginan Belanda untuk mendirikan negara Papua Barat yang merdeka dari Indonesia. Pada tahun 2019, konflik meningkat dengan serangan di Nduga dan demonstrasi di Papua. Pemerintah terus melakukan pendekatan yang berfokus pada keamanan dengan meningkatkan kehadiran aparat keamanan (TNI dan Polri) terhadap organisasi kriminal separatis bersenjata (KKSB) seperti TPNPB-OPM. Akibatnya, jumlah korban jiwa baik aparat keamanan, KKSB maupun warga sipil terus meningkat di Papua. Pemerintah telah mengubah pendekatannya terhadap keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan yang mengatasi akar penyebab konflik, termasuk penyelesaian sejarah terkait integrasi Irian Barat ke Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Asal muasal KKB Papua dapat ditelusuri dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didirikan pada tahun 1965. Tujuan OPM adalah membubarkan pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat serta memisahkannya dari Indonesia. Pemerintah menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris pada tahun 2021 karena tindakan kekerasan dan teroris yang menimbulkan korban jiwa.

Konflik yang terjadi di Papua saat ini tidak mempunyai akar yang sepele atau bahkan sederhana, namun bersumber dan berakar pada permasalahan yang cukup kompleks. Konflik Papua juga merupakan isu kompleks yang timbul dari integrasi sejarah dan politik Irian bagian barat dengan Indonesia. Konflik telah berkembang dari waktu ke waktu dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan aktor, termasuk isu-isu politik, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia. Menurut beberapa lembaga yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), konflik Papua disebabkan oleh perselisihan sejarah terkait apa yang disebut sebagai konflik Papua. Integrasi Irian bagian barat dengan Indonesia, belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM serta semakin marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua, berlanjutnya konflik di Papua disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perselisihan sejarah mengenai integrasi Irian bagian barat dengan Indonesia, kasus-kasus yang belum terselesaikan, pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Pemerintah harus mengubah perspektif keamanannya menjadi perspektif kemanusiaan yang mengatasi akar penyebab konflik. Selain itu, pemerintah juga harus memahami peran “orang besar” sebagai simbol pengurangan konflik sosial di Papua serta melibatkan generasi muda dan intelektual Papua dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penyelesaian konflik Papua harus terikat waktu dan melibatkan para ahli dalam penelitian dan rekomendasi penyelesaian konflik Papua. Pakar hukum internasional : guru besar hukum internasional fakultas hukum Universitas Indonesia, prof. Hikmahanto Juwana menilai penggunaan kekerasan yang dilakukan KKB di Papua tidak bisa dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan penindasan. Komunitas internasional memahami bahwa kekerasan yang dilakukan pemerintah tidak membenarkan penindasan di Papua.

Situasi semakin parah dan konflik KKB di Papua semakin meluas akibat kejahatan yang terus terjadi. Awalnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM), KKB melakukan berbagai kejahatan, antara lain pembunuhan massal, penodaan ruang publik, dan penggunaan senjata berat. Situasi ini menimbulkan maraknya suasana teroris terhadap masyarakat sipil Papua, yang diiringi dengan banyaknya korban jiwa dan kerusakan beberapa objek publik. Pemerintah Indonesia telah mengklasifikasikan KKB sebagai kelompok teroris, namun gerakan tersebut menuai banyak kritik dan kecaman baik dari masyarakat maupun organisasi hak asasi manusia seperti Komnas HAM yang menilai bahwa label kelompok teroris tidaklah tepat. menyelesaikan masalah. masalah dan baru menambah nama baru Situasi di Papua memanas akibat konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Konflik ini sudah berlangsung lama dan semakin meningkat serta jumlah korbannya pun terus bertambah.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kehadiran pasukan keamanan di Papua, namun situasinya masih bergejolak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap konflik tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban jiwa lebih lanjut, dan masyarakat tentunya membutuhkan perlindungan. Pemerintah juga diharapkan mengubah perspektif keamanannya menjadi perspektif kemanusiaan yang mengatasi akar penyebab konflik di Papua..

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai “teroris”. Sebutan tersebut digunakan KKB di Papua pasca beberapa aksi kekerasan brutal, termasuk pembunuhan pimpinan BIN Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Simbol teroris ini sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Pemerintah juga meminta aparat keamanan segera mengambil tindakan, cepat, tegas, dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pasal 1. Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Tahun 2002. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 4 April 2003 dan memuat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia.

Undang-undang ini mengatur bahwa kejahatan teroris tidak dapat dianggap sebagai kejahatan politik dan dapat diekstradisi atau dimintai tolong-menolong, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sebagian materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini, misalnya: kriminalisasi baru terhadap berbagai bentuk kejahatan teroris baru, peningkatan sanksi pidana bagi pelaku aksi teroris, peningkatan sanksi pidana bagi perusahaan, penambahan peraturan pidana, misalnya. pencabutan hak atas paspor untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan terhadap waktu dan korban tertentu sebagai bentuk tanggung jawab negara Undang-undang ini juga menegaskan bahwa instansi yang berwenang bertanggung jawab dalam pencegahan kejahatan teroris sesuai tugas dan wewenangnya. - Badan Terorisme. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peran Tentara Nasional Indonesia dan pengawasannya dalam pemberantasan tindak pidana teroris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh sebagai bagian dari penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan menurut variabel individu, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan kebijakan politik perdamaian yang dilakukan Gus Dur untuk mengatasi eskalasi konflik KKB-TNI.

Konflik di Papua yang diprakarsai oleh kelompok kriminal bersenjata sendiri merupakan konflik politik yang menuntut pembebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan masyarakat Papua, khususnya dengan masyarakat Indonesia. Ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah RI, KKB sangat ingin masyarakat adat Papua lepas dari penindasan. Gerakan pembebasan tersebut memuncak pada keinginan untuk memisahkan diri sepenuhnya dari NKRI. Meski demikian, pemerintah Indonesia tentu tidak menutup mata terhadap adanya gerakan separatis. Namun upaya pemerintah Indonesia untuk membasmi kelompok separatis tidak bisa dilanjutkan dengan aparat keamanan seperti TNI-POLRI, dialog, pembangunan intensif di Papua, atau perluasan penuh otonomi khusus Papua. Pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang bagaimana sistem demokrasi diterapkan, khususnya dalam konteks etnis Papua. Artinya, apakah Indonesia benar-benar demokratis dalam penerapan kebijakan Papua?

Dalam konteks konflik yang semakin meningkat di Papua, ayat menjadi pilar pemikiran Gus Dur sebagai obat atas gejolak yang ada. Konsep tauhid menjiwai kesadaran kolektif masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui Ketuhanan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Praktiknya misalnya terlihat pada dialog pemerintah dengan kelompok separatis yang mengedepankan semangat keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Pemahaman bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan keadilan menjadi landasan dalam membangun solidaritas antar sesama warga. Di sini menjadi jelas betapa pentingnya mendorong terselenggaranya pendidikan agama yang inklusif dan menghormati serta memahami keberagaman, yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan.

Meskipun perwujudan konsep tauhid tidak dapat dilakukan secara terpisah, namun upaya penyelesaian konflik yang hanya terfokus pada upaya perang seringkali menimbulkan korban jiwa yang besar baik dari pihak pemerintah maupun pihak separatis kelompok. Upaya untuk mengerahkan pasukan keamanan justru membungkam rasa kemanusiaan. Hal ini jauh dari tujuan Gus Dur. Gus Dur menekankan kemuliaan yang ada pada diri manusia sebagai pancaran kemuliaan Ilahi. Dengan begitu, Gus Dur jelas mengusung konsep kemanusiaan yang memuliakan rakyat Papua. Alih-alih memuliakan masyarakat Papua, pembangunan dahsyat dan otonomi khusus yang telah berlangsung selama 4.444 tahun hanya dinikmati oleh segelintir kecil elite Papua. Masyarakat akar rumput, pedesaan, dan pedalaman masih terjebak dalam berbagai bentuk keterbelakangan. Jika upaya pembangunan kemanusiaan tidak segera dilakukan, situasi di Papua saat ini akan terus memburuk di masa depan.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat lokal di Papua yang terinspirasi oleh Gus Dur merupakan upaya mendesak untuk memanusiasikan masyarakat Papua. Untuk membangun ikatan yang lebih kuat sekaligus mengurangi kemungkinan konflik, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Pengenalan nilai-nilai demokrasi telah terjadi karena pengambilan keputusan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta dan elite Papua saja, namun juga menjadi tanggung jawab mayoritas masyarakat Papua yang diwakili oleh tokoh masyarakat adat dan agama. Pemberdayaan lebih lanjut melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi lokal akan membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Identitas budaya lokal Papua juga harus diberi ruang semaksimal mungkin di ruang publik dengan semangat inklusivitas. Tujuannya agar masyarakat Papua merasa diakui identitas dan budayanya, sekaligus mengurangi rasa ketidakpuasan dan keterasingan mereka terhadap negara Indonesia secara keseluruhan.

Masyarakat Papua merupakan bagian penting dari kekayaan keragaman budaya, tradisi dan nilai-nilai yang ada di sana. Semua ini tidak boleh dianggap enteng atau diabaikan begitu saja dalam menghadapi dinamika konflik. Kearifan lokal Papua harus diintegrasikan secara langsung ke dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Oleh karena itu, lembaga adat perlu dilibatkan. Pilar Kemanusiaan Gus Dur dipaparkan dengan alam daerah dengan ciri-ciri tersebut. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan nilai inti pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan. Dengan cara ini, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak asasi manusia di Papua, termasuk kebebasan berekspresi dan berkumpul, dihormati dan dilaksanakan. mencakup penuntutan yang adil dan penyelesaian sengketa tanpa pelanggaran hak asasi manusia (Tebay, 2016).

Salah satu penyebab terjadinya konflik Papua adalah mood masyarakat Papua yang mempunyai kenangan menyakitkan terhadap Indonesia (Suropati, 2019). Kenangan menyakitkan ini akan menimbulkan konflik jika pemerintah Jakarta atau Papua memperlakukan warga Papua secara tidak adil. Konflik juga terjadi ketika masyarakat Papua merasa diperlakukan tidak adil. Gus Dur menunjuk pada perlakuan yang adil, hubungan yang setara, tidak adanya diskriminasi dan subordinasi, serta keterasingan dalam masyarakat. Hal ini hanya mungkin terjadi jika pemberdayaan

di Papua benar-benar mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah dan rumah sakit yang memadai, tidak hanya terbatas di perkotaan, tetapi juga dapat dicapai di pedesaan, tempat tinggal mayoritas penduduk Papua. Desa, masyarakat, petugas kesehatan, dan fasilitas kesehatan harus dipertimbangkan.

Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk membangun hubungan saudara kandung yang tinggi di antara anak-anak dari negara lain. Gus Dur megateam tanpa rasa persaudaraan, dialog dan pembangunan hanyalah alat kelembagaan (Aqil, 2020). Pada akhirnya, mencoba mengungguli pesaing Anda adalah usaha yang sia-sia. Harus diakui bahwa upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut bukanlah suatu proses yang mudah. Gus Dur menegaskan, upaya tersebut harus terus dilakukan sepanjang kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah, penetapan Ordo sebagai Putra Putri Bangsa Indonesia atau Putra Putri Papua patut mendapat pengakuan. Menurut Gus Durr, kesatriaian yang meliputi keberanian, kejujuran, tanggung jawab, pengabdian, kesabaran, dan kejujuran bisa efektif digunakan untuk mengatasi eskalasi konflik di Papua.

Faktor politik berperan penting dalam memicu dan memperpanjang konflik Papua. Salah satu pemicu utamanya adalah rasa ketidakadilan dan keterasingan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Serta pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu, masih terpatrit dalam ingatan kolektif masyarakat Papua. KKB memanfaatkan sentimen politik tersebut untuk merekrut anggota dan meraih dukungan masyarakat. Mereka sering menggunakan narasi pembebasan dan penentuan nasib sendiri untuk mengobarkan nasionalisme Papua dan membenarkan tindakan kekerasan mereka. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Papua melalui pendekatan dialog dan pembangunan. Namun, upaya-upaya ini gagal mengatasi akar permasalahan politik.

Banyak masyarakat Papua yang merasa bahwa mereka belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur politik Indonesia. Tuntutan otonomi khusus bahkan kemerdekaan merupakan wujud ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil dan tidak representatif. Hubungan kekuasaan ini semakin diperburuk dengan tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan sehingga berujung pada siklus kekerasan. Konflik Papua telah menjadi salah satu permasalahan paling kompleks dan sulit di Indonesia selama beberapa dekade. Konflik yang diawali dengan aneksasi Indonesia atas Papua sesuai dengan kemauan rakyat (Pepera) pada tahun 1969 telah mengakibatkan kerugian baik jiwa maupun materi, terhambatnya pembangunan, serta meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Papua.

Memahami akar permasalahan konflik Papua tidak lepas dari interaksi kompleks antara faktor politik, ekonomi, dan budaya. Di balik kisah perjuangan teritorial terdapat perjuangan multidimensi yang mencerminkan sejarah panjang penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi masyarakat Papua. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan salah satu isu keamanan yang kompleks dan multidimensi. Konflik masalah politik memainkan peran penting dalam dinamika KKB, dan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk:

- Perjuangan Kemerdekaan Sejumlah KKB berideologi pro-kemerdekaan Papua dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri (self-determination) bagi rakyat Papua. Mereka melihat Indonesia sebagai penjajah dan ingin melepaskan diri dari cengkeraman negara. Konflik politik ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu akar permasalahan utama.
- Ketidakadilan dan Marginalisasi Masyarakat Papua kerap merasakan ketidakadilan dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini memicu rasa frustrasi dan mendorong sebagian orang untuk bergabung dengan KKB sebagai bentuk perlawanan.
- Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat

keamanan juga menjadi faktor pendorong bagi KKB. Ketidakpercayaan ini muncul dari berbagai peristiwa di masa lalu, seperti pelanggaran HAM dan perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat Papua.

- Ketidakuasan terhadap Otonomi Khusus Pemberian otonomi khusus bagi Papua tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah politik di wilayah tersebut. Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa otonomi khusus belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan mereka.
- Eksploitasi Sumber Daya Alam Eksploitasi sumber daya alam di Papua oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat juga memicu konflik. Masyarakat adat merasa dirugikan dan tanah mereka dirampas.

#### B. Kondisi Sosial Ekonomi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua UU memfokuskan pembangunan pada empat bidang prioritas Papua: pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial ekonomi dan infrastruktur. UU Otsus Papua, UU Otsus Papua mengatur evaluasi pelaksanaan UU Otsus Papua setiap tiga tahun sekali. Bahkan ada tuduhan menimbulkan permasalahan baru terkait penyalahgunaan. Dana Pemerintahan Sendiri Khusus. Akibatnya, meski keempat sektor di Papua belum optimal mencapai prioritas pembangunan, namun sejak diberlakukannya Otonomi Khusus Papua, pembangunan infrastruktur fisik di berbagai wilayah Papua semakin meningkat, antara lain: Kita harus menyadari bahwa Gedung perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, Pembangunan jalan dan jembatan, Bandar udara dan jalur pelayaran. Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah siapa yang paling diuntungkan dari pembangunan ini: masyarakat Papua. Sebab, pertumbuhan struktur infrastruktur Papua berbanding terbalik dengan kehidupan sosial ekonomi penduduk Papua yang berjumlah jiwa, sebagian besar masih belum mampu bahkan jiwa sangat miskin. Hal ini semakin jelas terkait dengan hadirnya PT Freeport Indonesia PTFI di Kabupaten Mimika Perusa. Khan multinasional ini adalah pembayar pajak terbesar di Indonesia dan merupakan tambang tembaga dan emas. Pendapatan pajak dari PTFI berkisar antara \$700 dan \$800 per tahun. Secara keseluruhan dari sektor pertambangan. Daerah Papua merupakan negara penyumbang devisa sekitar Rp 24 triliun.

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Barat, juga sangat bergantung pada kegiatan industri ekstraktif, khususnya sektor pertambangan umum yang besarnya berkisar antara 50% hingga 60 % dan total PDRB provinsi tersebut sebesar .Sedangkan perikanan 6%, minyak, gas alam 5%, dan kehutanan 4%. Kontribusi ekspor Papua pada tahun 2002 berasal dari sektor pertambangan umum sebesar 84,19%, sedangkan migas menyumbang 3,2%. Kehutanan 5,18% dan perikanan 7,40%. Namun seluruh industri ekstraktif di Papua hanya mampu menyerap 10 persen devisa negara. tenaga kerja Hal ini menjadi bukti situasi kontradiktif yang terjadi di Papua. Menjadi wajib pajak terbesar di Indonesia, angka kemiskinan. sebenarnya merupakan yang tertinggi di Indonesia. Misalnya saja pada periode 2006 hingga 2007, angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing mencapai 36% dan 43%, serta angka pengangguran mencapai 9,13% Di Papua Barat jumlah kasusnya mencapai kasus, dan di Papua lima kasus mencapai 18 kasus. Oleh karena itu, menurut Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2004, kapasitas sumber daya manusia Papua paling rendah yaitu, Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan dan rendahnya pendapatan orang, namun menurut orang, orang Papua tidak miskin, mereka kurang beruntung Di Papua, diperlukan gambaran yang lebih lengkap sebagai indikator untuk mengukur kemiskinan.

Paradoks Papua juga terlihat pada perbedaan sistem pengelolaan PTFI yang modern dengan sistem penghidupan masyarakat adat Papua yang masih sangat tradisional. Secara umum, masyarakat adat Papua tersebar di tiga wilayah berbeda, yakni wilayah Kepala Burung, wilayah pegunungan tengah hingga pantai utara, dan wilayah Jaya Hilir di selatan Pegunungan Jayawijaya Terdapat suku Ayamal di wilayah Kepala Burung yang bermata pencaharian bertani dan berburu. Sedangkan

masyarakat Tobati Mi Dam Kaure Bauji Sentani dan masyarakat Engros tinggal di pegunungan tengah Pantai Utara dan bermata pencaharian bertani dan berburu. Tukang kebun memelihara babi sebagai pengumpul dan pengumpul. pengumpul dan pengumpul tinggal di dataran rendah yang berdekatan dengan di sisi selatan Pegunungan Jayawijaya, dan juga berburu, memancing, dan berkebun

Berdasarkan etnis, masyarakat asli Papua terbagi menjadi dua kelompok etnis utama. Yang pertama adalah masyarakat Melanesia yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, dan yang kedua adalah masyarakat Papua yang tinggal di dataran tinggi. Berdasarkan wilayah budaya Papua, orang Papua Melanesia tersebar di enam wilayah budaya. 1 Koleli di Biak-Numfor dan Kepulauan Raja Ampat 2 Kuli Pasai di kawasan Teluk Chenrawasih 3 Kawasan Kimani Drepun dan Ondoafi di Laut Papua Perbatasan dengan Papuania 4 Wamu atau Babi di Jajaran Tengah 5 Kayin Timur di Barat barat daya wilayah Kepala Burung, dan 6 Bas Mubis tenggara Papua yang terkenal dengan budaya batang besar yang diukir dengan motif manusia leluhur.

Perekonomian juga menjadi faktor penting dalam dinamika konflik Papua. Kesenjangan ekonomi yang lebar antara Papua dan wilayah Indonesia lainnya menjadi sumber kekecewaan bagi masyarakat Papua. Mereka merasa sumber daya alam Papua seperti emas dan tembaga kurang memberikan manfaat. Sebagai protes terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua, KKB kerap melakukan penyerangan terhadap infrastruktur perekonomian seperti tambang dan jaringan pipa gas. Mereka juga melakukan perampokan dan penculikan untuk mendanai operasi mereka. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun program-program tersebut gagal mengatasi kesenjangan ekonomi yang mendalam dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Kesenjangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia memicu konflik. Papua kaya sumber daya alam, namun masyarakat Papua merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Marginalisasi ekonomi ini melahirkan kebencian dan tuntutan kontrol yang lebih besar atas kekayaan Papua.

### C. konflik Budaya

Kehidupan manusia selalu terikat erat dengan tradisi. Tradisi merupakan adat istiadat yang diturunkan, diamalkan, dan dijalani dalam kehidupan secara turun temurun bagi MacIntyre, tradisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bermakna. Karena tradisi mengandung nilai-nilai sejarah yang menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari sejarah (MacIntyre, 1981). Pertanyaannya kemudian, apa peran kebiasaan dalam tradisi? Keutamaan tradisi merupakan kenyataan yang dapat diperkuat atau dilemahkan oleh masyarakat, dan juga membantu mereka mengamalkan keutamaan yang relevan dengan kehidupan mereka. Jika orang-orang tersebut mengikuti tradisi namun tidak menunjukkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian, maka makna pekerjaan yang dilakukan menjadi ambigu. Oleh karena itu, menurut MacIntyre, penting bagi masyarakat untuk menyadari sepenuhnya nilai-nilai tradisi yang mereka geluti.

Pemberontakan OPM-KKB di Papua jelas menunjukkan betapa orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut tidak menjunjung tinggi tradisi bangsa Indonesia. Dengan kata lain, orang-orang ini melupakan sejarah hidupnya. Bahkan, anggota OPM-KKB yang melakukan aksi kekerasan tersebut melupakan perjuangan kolektif pendahulunya dan seluruh bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Apalagi masyarakat tersebut lupa akan falsafah yang terkandung dalam Pancasila, yakni "gotong royong" yang dianut oleh para pejuang dan pemimpin negara terdahulu. Semangat "gotong royong" mempunyai nilai yang sangat kompleks seperti kemanusiaan, kesatuan, persatuan, persaudaraan, dan lainnya. Oleh karena itu, kesadaran penting yang harus dimiliki setiap individu dalam rangka mencintai tanah air adalah kejujuran, keadilan, dan keberanian, sebagaimana tertuang dalam karya MacIntyre yang penuh makna.

Konflik budaya di Papua disebabkan oleh perbedaan budaya antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Masyarakat Papua mempunyai identitas budaya yang berbeda dan berjuang



untuk menentukan nasib sendiri, yang sering kali bertentangan dengan fokus pemerintah pusat pada persatuan nasional. Masyarakat Papua merasa berbeda secara budaya dengan masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam di Indonesia. Fokus pemerintah pusat pada persatuan nasional seringkali bertentangan dengan aspirasi masyarakat Papua untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan pengakuan atas identitas budaya mereka. Konflik politik dan budaya di Papua terus meningkat, dengan adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan provinsi yang kaya sumber daya seperti Papua. Masyarakat Papua, yang sebagian besar adalah orang Melanesia dengan tradisi animisme dan Kristen, merasa berbeda secara budaya dengan masyarakat Jawa Muslim di Indonesia. Fokus pemerintah pusat pada persatuan nasional seringkali bertentangan dengan upaya Papua untuk meningkatkan otonomi dan mengakui identitas budayanya.

Permasalahan budaya di Papua antara lain:

1. Keterbatasan pengelolaan sumber daya budaya Papua mempunyai potensi sumber daya budaya yang kaya, namun belum dikelola dengan baik. Anggaran kebudayaan terlalu kecil dan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih terbatas.
2. Konflik Budaya Politik Konflik budaya politik di Papua disebabkan oleh perbedaan visi pemerintahan antara pemerintah pusat dan provinsi. Masyarakat Papua yang memiliki identitas budaya tersendiri merasa berbeda secara budaya dengan masyarakat Jawa Muslim di Indonesia. Fokus pemerintah pusat pada persatuan nasional seringkali bertentangan dengan upaya Papua untuk meningkatkan otonomi dan mengakui identitas budayanya.
3. Marginalisasi dan diskriminasi Marginalisasi dan diskriminasi ras terhadap identitas Papua terus meningkat. Fakta bahwa jumlah imigran melebihi jumlah penduduk Papua, yang merupakan minoritas di wilayah mereka, mengundang kesenjangan dan kecemburuan keterlambatan
4. Pengelolaan warisan budaya Situs arkeologi dan budaya material tidak dipertimbangkan. Belum adanya pegawai yang memiliki pelatihan arkeologi di lembaga kebudayaan, sehingga pengelolaan cagar budaya masih sebatas penyelenggaraan festival budaya.
5. Keterlambatan pengelolaan budaya Pengelolaan budaya di Papua hanya sebatas penyelenggaraan festival budaya. Manajer regional tidak memiliki staf yang terlatih dalam bidang antropologi atau arkeologi, sehingga kebijakan sering berubah dan program kerja bersifat sporadis.
6. Keterlambatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Marginalisasi tampaknya terjadi di beberapa bidang seperti ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia hingga tingkat politik. Keterwakilan masyarakat adat Papua di parlemen Papua dan Papua Barat sangat rendah.
7. Keterlambatan kontrol politik Konflik politik di Papua masih memanas dan belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik ini dalam waktu dekat. Pemerintah pusat tidak memiliki strategi yang matang untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan integritas nasional dan keharmonisan antar masyarakat.
8. Keterlambatan pengelolaan sumber daya alam Papua mempunyai banyak potensi sumber daya alam, namun tidak dikelola dengan baik. Misalnya, wilayah Asmati memiliki tipe habitat yang berbeda-beda, namun masyarakat adat Asmati memiliki permasalahan gizi buruk dan perkembangan motorik yang tertunda.

Budaya Papua juga mempengaruhi dinamika konflik. Kesenjangan budaya antara Papua dan Indonesia dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahpahaman. Hal ini dapat memperburuk konflik dan mempersulit upaya mencari solusi. KKB kerap menggunakan simbol budaya dan ritual adat Papua untuk membenarkan tindakan kekerasannya. Mereka juga memanfaatkan tradisi dan kepercayaan Papua untuk mendapatkan dukungan. Pemerintah Indonesia perlu memperdalam pemahamannya tentang budaya Papua dan membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemimpin adat. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan kerja sama dalam upaya penyelesaian konflik.

## **KESIMPULAN**

KKB Papua merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di Papua, Indonesia. Kelompok tersebut kerap terlibat dalam kegiatan separatis dan kerap melakukan aksi kekerasan. Kesimpulan mengenai KKB Papua adalah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan serta berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini meliputi operasi militer dan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. permasalahan kompleks dengan berbagai faktor politik, sosial dan ekonomi. Kesimpulan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan informasi yang dipertimbangkan. Kesimpulan umum yang sering dibahas mencakup perlunya pendekatan komprehensif dalam penyelesaian masalah, termasuk dialog, pembangunan ekonomi, dan peningkatan keamanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

5973-Article Text-17679-1-10-20220725[1].pdf

Ayorbaba, Anthonius. (2011). *The Papua Way Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otsus Papua, Suara Perempuan Papua.*

CNN Indonesia, "Komnas HAM Catat 480 Kasus Kekerasan di Papua oleh TNI, Polri & KKB", pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb>. Diakses pada 29 Maret 2022

Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854-869

<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/571>

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/download/46930/27353/192272>

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/42327>

Sianturi, B. H., Hanita, M., Ketahanan, K., & Universitas, N. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ( Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua ) *Pendahuluan Pencegahan dan*